

ABSTRAK

Perjanjian Kerjasama Pembuatan Film merupakan Perjanjian yang lahir dari adanya asas kebebasan berkontrak. Dengan asas ini, seseorang dapat dengan bebas membuat suatu perjanjian diluar perjanjian-perjanjian bernama yang diatur dalam KUH Perdata, KUHD dan Undang-undang lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana akibat hukum pembatalan perjanjian yang dilakukan atas kesepakatan para pihak yaitu Pihak PT. Tripal Multivision Plus dengan Pihak Rachmawati Soekarno Putri jika ditinjau dari hukum perjanjian dan apakah tindakan PT. Tripal Multivision Plus dengan tetap memproduksi Film tentang Soekarno yang notabene merupakan isi dari perjanjian kerjasama dengan Pihak Rachmawati Soekarno Putri yang telah dibatalkan dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum. Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis mengambil judul Tinjauan Yuridis Akibat Hukum Pembatalan Perjanjian Kerjasama Pembuatan Film Antara Rachmawati Soekarno Putri dengan PT. Tripal Mutlivision Plus (Studi Putusan Nomor 499/Pdt.G/2013/PN.JKT.PST).

Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif. Data yang digunakan adalah data primer berupa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 499/Pdt.G/2013/PN.JKT.PST dan data sekunder berupa buku-buku literatur, dokumen resmi, dan hasil-hasil penelitian dari kalangan hukum. Analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif, dimana menjelaskan uraian-uraian fakta hukum kemudian dikaitkan dengan hasil penelitian yang ada.

Hasil penelitian menyatakan bahwa 1) akibat pembatalan perjanjian kerjasama antara Rachmawati Soekarno Putri dengan PT. Tripal Multivision Plus hanya berdampak pada perikatan-perikatan yang belum terlaksana karena perjanjian dibatalkan dan tidak berlaku surut terhadap perikatan yang telah terlaksana; 2) tindakan PT. Tripal Multivision Plus dengan tetap memproduksi film tentang Bung Karno tidak dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum karena tidak termasuk dalam salah satu unsur perbuatan melawan hukum.

Kata Kunci: Perjanjian Kerjasama, Pembatalan Perjanjian, Perbuatan Melawan Hukum

ABSTRACT

The Corporate agreement is one of agreement that was born from the principle of freedom of contract. Through this principle, a person may freely enter into an agreement outside the nominate contracts as stipulated in the Indonesian Civil Code, Commercial code and other laws. This research aims to find out how the consequences of the cancellation of the agreement by those who make it, if been reviewed from the Indonesian Civil Code and what is the action of Tripal Multivision Plus Company that keep producing film about Soekarno can be categorized as the act against law. As described above, the writer make a heading with title Judicial Review of the cancellation of cooperation agreement of the filming between Rachmawati Soekarno Putri with Tripal Multivision Plus Company (Study The Court's Decision Number 499/Pdt.G/2013/PN.JKT.PST)

This Research was conducted by using a normative juridical approach. The data used is primary data, that is The court's decision number 499/Pdt.G/2013/PN.JKT.PST and Secondary data is the books literature, document official and the result of the law academician. Analysis of data used is descriptive analysis, which explains the description of legal facts and then associated with the result of research.

The result of this study showed that 1) the consequence of cancellation agreement between Rachmawati Soekarno Putri with Tripal Multivision Plus Company just affects the grant that have not been executed after the agreement is canceled; 2) The action of Tripal Multivision Plus Company which keeps producing films about BUNG KARNNO can not be categorized as the act against law because the actions of Tripal Multivision Plus Company not belong to one elements of the act against law.

Keywords: *Coorporation agreement, cancellation agreement, Act against law*